

**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI WILAYAH
PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN MALINAU**

SKRIPSI

Sebagai satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

ALPRED ALPREDO
NPM. 201842003



**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS KALTARA
2022**

Abstrak

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang dan Nawang Baru. sumber data yang diambil meliputi data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen, dan data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berupa wawancara bersama pihak terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta studi dokumentasi, kemudian dilakukan analisis kualitatif menggunakan analisis data model interaktif.

Adapun hasil penelitian ini antara lain Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru). Dilihat dari kedua desa tersebut Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru belum berjalan secara bersinergi didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dimana Desa Long Nawang telah merasakan pembangunan yang nyata dari pemerintah, sedangkan di Desa Nawang Baru belum sama sekali terealisasi pembangunan infrastruktur yang ada karena dana yang belum ada. Diharapkan pemerintah harus mampu menjawab semua permasalahan pembangunan di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu.

Kata Kunci : Pembangunan infrastruktur,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia menjadi penting untuk diangkat kembali ketika prinsip-prinsip pembangunan di dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dan sulit di cari solusinya. Seiring telah ditetapkannya Pengaturan Pembangunan Desa Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa peraturan pedesaan yang telah disahkan dengan di dukung oleh DPR ini telah mensinergikan sejumlah prinsip program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) termasuk perencanaan partisipatif desa, implementasi kegiatan berbasis desa, kolaborasi antara desa dan upaya meningkatkan mekanisme akuntabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa masyarakat diharapkan mengemban tanggung jawab dan kendali atas urusan desanya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan. Musyawarah tahunan masyarakat desa akan menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang desa maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 43 Tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang desa yang di dalam nya mengatur tentang penataan desa, kewenangan, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa,

keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan,

Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, pembinaan dan pengawasan desa oleh Camat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 bahwa bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan Undang-Undang Desa dengan setiap tugas warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang hanya sedikit setiap desa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar besarnya kemakmuran warga masyarakat desa. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap Tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota.

Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan pembangunan di setiap desa masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari ketidakseimbangannya pembangunan yang ada, karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian,

dan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan serta ketertinggalan dalam suatu desa.

Program ekonomi saat ini memprioritaskan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah pedesaan haruslah menjadi suatu prioritas dan harus

mendapat perhatian yang lebih serius untuk masa yang akan datang. Keterbatasan yang dirasakan masyarakat tersebut yang berada di sekitar Kecamatan Kayan Hulu sangat banyak yang dirasakan karena minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang kurang baik, seperti jalan yang menghubungkan antara desa yang satu ke tempat yang lainnya masih banyak yang berlubang karena pengangkutan alat berat oleh perusahaan yang ada di tempat tersebut.

Sarana dan prasarana yang masih sangat kurang, yang menyebabkan kurangnya juga informasi yang masuk. Penelitian dilakukan untuk meneliti pembangunan yang terjadi di bidang pembangunan fisik atau infrastruktur desa. Kedua desa yang peneliti pilih karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur yang ada, sehingga tidak optimal masalah pembangunan desa yang ada secara umum. Dua desa ini memiliki mata pencaharian pertanian (ladang/sawah), walaupun ada beberapa yang memiliki mata pencaharian swasta.

Maka dari itu kedua desa tersebut perlu untuk diteliti karena dalam segi pembangunan desa kedua desa tersebut adalah fokus dari pembangunan di Kecamatan Kayan Hulu tetapi masih terdapat dalam pembangunan infrastruktur di kedua desa tersebut tidak terlaksana secara optimal atau bersinergi. Di karenakan tidak diperhatikannya pembangunan yang dilakukan, pembangunannya hanya difokuskan pada satu desa saja tetapi tidak untuk semua yang ada di sekitar Kecamatan Kayan Hulu. Pembangunan yang ada

belum berjalan secara optimal banyak kendala yang ada karena tidak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ ***PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MALINAU***”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengembangan pembangunan desa tertinggal di wilayah perbatasan sudah berjalan di kabupaten malinau?

2. Apakah wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau sudah terjadi pemerataan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengembangan pembangunan desa tertinggal di wilayah perbatasan sudah berjalan di kabupaten malinau?
2. Untuk mengetahui wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau sudah terjadi pemerataan.

1.4 Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan dalam masyarakat. Menurut Bactiar Effendi (2002:9), pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada.

Menurut Sondang P.Siagian (2005:4), pembangunan di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas. Menurut Siagian dalam Riyadi (2004:4), pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan prubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Menurut Rostow (dalam Budiman 2000:25-28), dengan teori pembangunan modernisasi dengan lima tahap pembangunan dan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju. Lima (5) tahap pembangunan menurut Rostow yaitu : 1. Masyarakat Tradisional 2. Prakondisi Tradisional 3. Lepas Landas 4. Bergerak ke Kedewasaan 5. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi **3. Pembangunan Desa** Menurut Siagian (2003:108), pembangunan desa adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa seta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Kemudian menurut Sajogyo dan Pudjiwati (1996:136), pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh terpadu dan terkordinasi.

Selanjutnya menurut Raharjo Adisasmita (2006:20), pembangunan desa yang dilakukan dengan pendekatan multisektoral, partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras

dan sinergis sehingga tercapai optimalisasi. Berdasarkan hal tersebut ada tiga prinsip pokok dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut : 1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan yakni : a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi c. Stabilitas yang sehat dan dinamis Ketiga trilogi pembangunan tersebut di terapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota yang dikembangkan secara selaras dan terpadu. 2. Pembangunan desa dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan setiap daerah pemanfaatan sumber pertumbuhan yang tersedia di daerah tersebut. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin. 3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

2.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah Perbatasan dan Pendekatan Produk/Komoditas Unggulan Daerah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah perbatasan yang mandiri yang di cita-citakan melalui kebijakan desentralisasi.

Pembangunan ekonomi daerah perbatasan dapat di artikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya wilayah perbatasan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah perbatasan tersebut.

Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial dan bahkan sumber daya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Menurut Sudarsono (2001), dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global. Beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar daerah mampu berkompetisi antara lain:

1. Birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi peran dan tanggung jawabnya yakni hanya bersifat mengarah dan membina bukan menentukan (*steering than rowing*).

Sehingga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah hanya berkisar pada bidang-bidang dimana sektor swasta atau pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut, misalnya dalam situasi terjadinya kegagalan pasar.

2. Birokrasi Pemda harus dapat berkiprah secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima untuk meraih investasi dalam dan luar negeri
3. Membentuk system dan jaringan kerja dengan lembaga/asosiasi bisnis dan atase perdagangan luar negeri, khususnya dalam mendukung pemasaran produks ekspor.
4. Mengembangkan lembaga R dan D (*research and development*) terhadap jenis produksi unggulan untuk menjamin kualitas produk, kestabilan harga, kebutuhan pasar dan jaminan kontinuitas ketersediaannya.
5. Memfasilitasi lembaga keuangan agar bersedia memberikan modal usaha bagi industri skala kecil dan menengah pada berbagai sektor unggulan daerah, sehingga mereka dapat menjamin dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
6. Berperan mentransportasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di berbagai sektor unggulan produk daerah, agar proses produksi dapat mencapai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.
7. Mendorong agar para produsen mengembangkan jenis-jenis produk unggulan yang bersifat komplementer baik intern maupun antar region, memiliki nilai tambah dan menghasilkan manfaat ganda baik secara *backward-linkage* dan

forward linkage terhadap berbagai sektor, dengan demikian dapat memperkuat posisi daerah dari pengaruh fluktuasi ekonomi.

8. Memposisikan birokrasi pemerintah daerah cukup berperan sebagai katalisator, stimulator, dan regulator agar mekanisme pasar dapat bekerja secara sehat.
9. Memprioritaskan program pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan dalam rangka kemudahan aksesibilitas usaha di bidang industri meliputi sarana transportasi, komunikasi, energi, lokasi industri, sarana dan prasarana pelayanan umum yang baik serta situasi lingkungan yang sehat dan aman.

2.3 Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Robert J Kodoatie 2005:8), infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Di era otonomi, pemerintah harus memberikan kejelasan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang akan dicapai sesuai dengan keinginan

masyarakat yang ada daerah, sebab masyarakatlah yang lebih memahami sektor ekonomi mana yang perlu di tingkatkan, dikembangkan, dipertahankan, sesuai dengan sosio-kultur daerahnya tersebut. Grand (dalam Ulyani 2013:19), mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa : a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan, dll b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar c) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah dan puskesmas d) Prasarana produksi saluran air.

Dalam peraturan daerah No.07/2014 (2014:IV-10), pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antara wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga

meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi dan kelistrikan) secara merata. Program peningkatan infrastruktur pedesaan ini adalah salah satu item yang termasuk dalam bidang percepatan pembangunan pedesaan, yang terprogram dalam Program Satuan Kerja Prangkat Daerah (PSKPD) Kabupaten Malinau. Sesuai dengan Visi dan Misi dari Kabupaten Malinau yang merumuskan tentang masalah utama minimnya infrastruktur di desa seperti jalan, jembatan, air minum, listrik dan telekomunikasi. Untuk pembangunan infrastruktur ditunjukan ke seluruh pedesaan, kecamatan serta tata pedesaan dan kecamatan berupa pembangunan jalan dan jembatan. Dengan tujuan untuk memudahkan akses transportasi, komunikasi dan informasi agar tertata lebih baik, rapi, indah dan tertib.

2.3 Defisi Desa

Asal mula desa pertama kali dikemukakan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe (Pembantu Gubernur Jendral Inggris) seorang belanda. Desa muncul dalam laporan kepada pemerintahnya tanggal 14 juli 1817 menyebutkan tentang adanya desa-desa di daerah pesisir Utara Pulau Jawa. Kemudian ditemukan juga desa-desa di luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa di Jawa. Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Haw. Widjaja (2003:3), desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut R. Bintarto (1984:10), desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, kultur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Desa sebagai suatu perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, politisi, dan kultural yang terdapat hubungannya dengan pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya. Dari beberapa konsep dan teori yang ada, maka penulis dapat merumuskan defenisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Long Nawang dan Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau merupakan suatu program Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malinau tersebut.

2.4 Gambaran wilayah perbatasan Indonesia untuk perbatasan laut

Pantai timur Sumatera (Provinsi. Aceh NAD, Provinsi. Riau, Provinsi.

Kepulauan Riau) berbatasan dengan Semenanjung Malaysia (Johor, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan), Singapura, dan Thailand, Provinsi. Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau) berbatasan dengan Malaysia (Sabah) - Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina Selatan (Mindanao) Dan gambaran wilayah perbatasan Indonesia untuk perbatasan darat adalah:

- a. Provinsi. Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah)
- b. Provinsi. Papua berbatasan dengan Papua New Genu
- c. Provinsi. NTT berbatasan dengan Timor Leste

Pada kegiatan perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, jenis komoditi yang diperdagangkan adalah hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya yang berasal dari daerah perbatasan Republik Indonesia, tidak termasuk minyak, mineral dan biji-biji tambang, sedangkan dari Malaysia berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang perlengkapan industri yang dibutuhkan masyarakat perbatasan. Kabupaten Malinau dimana, terletak berseberangan dengan negara tetangga berbatasan dengan negara Malaysia, di bagian Kabupaten Nunukan berbatasan dengan Wilayah Sabah sedangkan Kabupaten Malinau berbatasan dengan wilayah Serawak.

2.5 Kerangka Fikir

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Webster (dalam Abdul Wahab 2005:64) implementasi secara pendek berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika lihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Hakikat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Mazmanian dan Sabartier (dalam Abdul Wahab 2005:68-69) mengemukakan “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Abidin, 2004 : 199) ada dua konsep dasar berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Pertama konsep peralatan kebijakan (*policy instruments*). Peralatan kebijakan adalah cara yang dipakai dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau ingin dicapai (*policy objective*).

Peralatan kebijakan ini berhubungan dengan sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur dan organisasi. Sumber daya manusia dan aparatur

pemerintahan adalah subjek dan sekaligus juga objek dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai subjek penjelasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan. Sebagai objek sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan suatu kebijakan. Kedua, konsep tentang kewenangan yang tersedia untuk melakukan pelaksanaan. Mengenai kegagalan implementasi kebijakan, menurut Wibawa (dalam Abdul Wahab : 2008), implementasi kebijakan yang ditolak kelompok sasaran atau kelompok sasaran tidak menerima kebijakan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal yaitu : a) Kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, ini dimungkinkan isi kebijakan tidak menyentuh kepentingan mereka. b) Kelompok sasaran tidak menyadari manfaat dari kebijakan tersebut dan oleh karenanya mereka tidak merasa membutuhkannya. c) Kelompok sasaran tidak menyukai birokrat pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini juga lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia. Dengan kata “Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

. Dari hasil data yang diperoleh dari penelitian adalah data empiris (teramati), sedangkan tujuan dan kegunaan dari penelitian sendiri terdapat tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sugiyono (2006 :1-3) Dapat difahami bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah dan tersistematis yang dilakukan untuk mengetahui serta menyelidiki suatu fenomena terkait dengan peneliti.

Pada dasarnya Metode dalam penelitian ini adalah penting untuk mengetahui gambaran dan data-data yang diperlukan berkaitan dengan produk unggulan dan aktivitas perdagangan lintas batas yang terjadi wilayah perbatasan gunakan oleh peneliti.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didefinisikan sebagai kegiatan terencana untuk menangkap praktik secara penafsiran responden maupun informan terhadap dunia. Perlu disadari bahwa orang bertindak sejalan dengan penafsirnya terhadap benda, fenomena, atau masalah yang dihadapinya. Faktanya ataupun kenyataan yang ada belumlah dapat kita percaya secara benar, melainkan berguna hanya sejauh penafsiran seseorang yang menggunakannya. Istilah kualitatif menunjukkan penekanan terhadap proses-proses dan makna-makna yang tidak dapat diuji atau diukur baik dari segi kuantitasnya, intensitasnya, maupun frekuensinya. Ariesto dan Adrianus (2010 Hal :1)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya sikap, pendapat, tekad, kegiatan dan lain-lain. Moleong (2007 :6) bentuk penelitian ini tercakup dalam bentuk penelitian berupa deskriptif, yaitu penelitian yang hanya gambaran, rangkuman berbagai keadaan, kedudukan atau berbagai variabel. Burhan Bungin (2001 :33)

Metode kualitatif dalam penelitian yaitu dengan menyertakan antara kenyataan *empiric* dengan pendapat/teori yang melegalkan dengan penggunaan metode deskriptif analisis.

bentuk penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk menemukan ilmu pengetahuan seluas-luasnya tentang obyek penelitian pada waktu atau masa tertentu sehingga lebih mudah menyajikan dan menganalisis secara sistematis dan akhirnya dapat dimengerti dan dirangkum. M. Manulang (1999 :137) Menggunakan dengan metode kualitatif ini dapat ditekan dalam bentuk analisa pada fenomenal yang diamatinya yaitu penggunaan cara fikir formalitas maupun secara argumentasi.

Definisi tentang bentuk penelitian pada deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian sosial yang secukupnya dapat dilukiskan atau digambarkan banyaknya variabel yang berkenaan dengan permasalahan dan bagian yang diteliti tanpa mempermasalahkan hubungan antar variabelnya, metode penelitian kualitatif berupaya memperlihatkan cara pandang yang utuh (*holistic*) yang memerlukan ketelitian dalam gagasan, hingga dapat dipahami secara total dari akhirnya penelitian. Burhan Bungin (2001 :10) Selain itu juga, bentuk penelitian kualitatif ini peneliti bisa langsung obyek penelitian tersebut guna memperoleh data yang peneliti butuhkan.

Penelitian ini berupaya untuk dapat gambaran dan mendeskripsikan kebenaran ataupun spesifik kejadian yang ada secara fakta, teliti, tidak mengandalkan bukti logika matematik, prinsip angka atau metode statistika hingga dapat menggambarkan kondisi dan keadaan yang sebenarnya dengan mengisyaratkan atau aktivitas sosial.

3.3 Lokasi Penelitian

Maksud Penelitian ini bersifat komparasi maka lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini, yakni Kabupaten Malinau yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena kedua merupakan wilayah perbatasan langsung dengan negara Malaysia, dimana Kabupaten memiliki merupakan desa tertinggal dan terisolir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk akuratnya data tersebut, maksudnya penelitian ini menggali dari berbagai macam dan sumber data yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber aslinya (informan) tanpa melalui perantara. Sumber data yang primer yang paling penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian adalah tentang bagaimana pengembangan pembangunan desa tertinggal wilayah perbatasan Kabupaten Malinau. Data ini diperoleh dari badan pengelolaan perbatasan provinsi Kalimantan Utara, tentang BPS Provinsi Kalimantan Utara Disprindakop Provinsi Kalimantan Utara, sistem perdagangan lintas batas dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan provinsi Kalimantan utara di Kabupaten Perbatasan Malinau.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Moleong (2008 :86) dimana digunakan peneliti untuk menunjang data primer. Data sekunder merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga. Selain itu data sekunder yaitu peneliti akan menggunakan data apapun yang dapat mendukung data primer, atau berasal dari bahan kepustakaan. Sumber ini berupa sumber tertulis seperti foto, buku, majalah, arsip, catatan transaksi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan judul tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru), maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian analisis kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi terhadap data-data, serta melakukan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis data model interaktif, yakni dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau secara demografis, terletak dibagian barat dan utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, khususnya Negara bagian Serawak. Selain berbatasan dengan negara Malaysia, Kabupaten Malinau juga berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Barat yang berada di sebelah selatan, serta Kutai Timur, Berau, dan Kutai Kertanegara yang berada di sebelah timur. Sementara Kabupaten Nunukan berada disebelah utara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan.

Keberadaan Kabupaten Malinau memanjang dari barat dan selatan ke utara dan sedikit miring ketimur dengan luas 39.799,90 km². Semenjak tahun 2010 populasi penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 62.423 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,57 jiwa/km². Letak Kabupaten Malinau yang berbatasan dengan beberapa wilayah, yakni 3 Kabupaten di Kalimantan Utara dan 4 Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur; dan negara bagian serawak Malaysia tentu memiliki potensi asimilasi budaya yang tinggi, yaitu berbentuk bahasa daerah.

Kabupaten ini memiliki 12 Kecamatan dengan total 109 desa. Kabupaten ini memiliki lima kecamatan yang merupakan kecamatan perbatasan (berbatasan darat langsung dengan Serawak, Malaysia) di antaranya Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan dan Bahau Hulu.

Terjadinya persinggungan penduduk asli Kabupaten Malinau dengan wilayah sekitarnya sangat memungkinkan terjadi asimilasi budaya dan akulturasi. Apabila Kabupaten Malinau telah di diami oleh beberapa suku asli yang ada di Pulau Kalimantan seperti suku Dayak Tidung; Dayak Kenyah, Dayak Burusu, Dayak Tagal, Dayak Merap, Dayak Punan, Dayak Abbay, dan Lun Bawang/ Lun Dayeh.

Jumlah suku yang banyak dan berbeda-beda ini semakin memungkinkan terjadinya akulturasi budaya di Kabupaten Malinau. Meskipun suku-suku tersebut masih berasal dari satu rumpun. Setiap suku biasanya memiliki bahasa tersendiri dan tradisinya, salah satu cara membedakan suku tersebut adalah dengan bahasanya yang tidak sama.

Wilayah Kabupaten Malinau yang sangat luas dengan kepadatan penduduk yang kecil dan jumlah suku yang mendiaminya dapat diasumsikan dengan wilayah yang memiliki bermacam variasi bahasa. Berdasarkan jumlahnya variasi bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yakni variasi bahasa yang terdapat dalam suatu bahasa dan variasi bahasa dalam bentuk berkerabat.

Menurut Mahsun, variasi bahasa, dapat dibedakan dalam tiga jenis varian yaitu :

- 1) Varian yang berhubungan dengan faktor geografis;
- 2) Varian yang berhubungan dengan faktor waktu; dan
- 3) Varian yang berhubungan dengan faktor sosial.

Demikian halnya dengan etnis-etnis yang mendiami Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau, kita dapat mengidentifikasi bahasa-bahasa lokal atau bahasa daerah dengan melihat perbedaan etnisnya. Secara umum, ada delapan etnis yang mendiami wilayah Malinau, yaitu etnis Dayak Tidung; Dayak Kenyah, Dayak Burusu, Dayak Tagal, Dayak Merap, Dayak Punan, Dayak Abbay, dan Lun Bawang/ Lun Dayeh. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ada pula delapan bahasa lokal yang digunakan di Kabupaten Malinau. Bahasa-bahasa lokal tersebut terpecah-pecah menjadi beberapa variasi bahasa atau dialek. Dialek atau variasi bahasa itu menyebar secara geografis di beberapa lokasi perkampungan warga.

Pesebaran bahasa daerah di Kalimantan Utara, termasuk di Kabupaten Malinau terdapat 21 bahasa daerah yang digunakan secara fungsional dan bahasa daerah yang digunakan secara komplementer.

4.2.1 Demografi

Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terluas di Kalimantan Utara, yaitu seluas 39.799,90 km² dengan populasi penduduk relatif sangat sedikit yaitu sebanyak 62.423 jiwa.

Kabupaten Malinau berada di Wilayah pedalaman yang pada umumnya merupakan pemukiman bagi suku Tidung dan suku Dayak. Kabupaten Malinau merupakan satu dari dua daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Kabupaten Malinau memiliki juga memiliki satu bandar udara domestik yaitu Bandar udara Kolonel Robert Atty Bessing dan banyak bandar udara perintis perbatasan salah satunya yaitu Bandar Udara Long Ampng di Kecamatan Kayan Selatan.

Dengan demikian persebaran penduduk yang sangat jarang, Kabupaten Malinau banyak memiliki wilayah yang berupa hutan dan gunung. Dimana hutan yang luas tersebut dialiri sungai besar dan kecil merupakan titik perkampungan penduduk. Sungai yang mengalir tersebut memiliki peran penting bagi penduduk. Selain sebagai prasarana transportasi air, sungai juga dimanfaatkan sebagai pusat peradaban berbagai etnis di Kabupaten Mallinau.

4.2.1 Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau

Potensi ekonomi di Kabupaten Malinau secara umum masih didominasi oleh sektor-sektor yang mengandalkan sumber daya alam. Selain Kabupaten Malinau cukup unggul khususnya pada sektor kehutanan yang memiliki hutan yang sangat luas, Kabupaten Malinau juga memiliki potensi sumber daya mineral, yaitu batu bara. Dimana sistem ekonomi ada beberapa sektor yang mendominasi, ada beberapa struktur perekonomian kabupaten Malinau dapat dilihat dari kontribusi sektor-sektor dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Sektor-sektor usaha di Kabupaten Malinau

No	Lapang Usaha	Jumlah (%)
1.	Pertanian	21, 44
2.	Pertambangan dan Pengalian	28, 87
3.	Industri Pengolahan	0, 07
4.	Listrik, Gas, dan Air Minum	0, 19
5.	Bangunan dan Kontruksi	13, 96
6.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	12, 00
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	18, 36
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa	0, 30
9.	Jasa-jasa	4, 81
Jumlah		100,00

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara 2018

a. Sektor Perkebunan

Selain itu Kabupaten Malinau juga memiliki sektor perkebunan, dimana memiliki potensi yang sangat bagus mengingat lahan yang luas, untuk pengembangan sektor perkebunan. Ini merupakan pengembangan bagus bagi Kalimantan Utara dalam pengelolaan dan menghasilkan komoditas produk unggulan dibidang sektor perkebunan. Ada beberapa komoditas unggulan disektor perkebunan yang terdapat pada tabel 4.2 yaitu meliputi :

Tabel 4.2
Sektor perkebunan Kabupaten Malinau

No	Komoditas Utama	Luas Lahan Potensial (Ha)	Luas Lahan Dimanfaatkan (Ha)	Produksi (Ton)	Keterangan
1.	Kakao	1.701	1.641	290	-
2.	Lada	175	3	1	
3.	Karet	2.493	2.493	25	
4.	Kelapa Sawit Perusahaan	14.326	0	0	Memiliki Pabrik Pengolaan

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara 2018

b. Sektor Pertambangan Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau juga memiliki sumber daya alam berupa Batu bara Tereka (ton) : 18.100.000,00 Terunjuk (ton) : 34.847.000,00 Terukur (ton) : 61.395.000,00

Tabel 4.3
Sektor Pertambangan Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau	Komoditi	Wilayah Pontensial
Cadangan terbukti (ton) : 43.061.260,00	Batu Gamping, Sirtu, Batu Pasir	Malinau, Mentarang

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara 2018

c. Pembangkit Listrik

Di Kabupaten Malinau terdapat sungai yang berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu Sungai Mentarang.

Tabel 4.4
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau,
2017–2019

2017		2018		2019	
Laju Petumbuhan Penduduk		Laju Petumbuhan Penduduk		Laju Petumbuhan Penduduk	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
2 876	4.15	2 987	4.11	3 102	4.08
2 292	4.15	2 380	4.11	2 472	4.09
3 394	4.14	3 525	4.10	3 661	4.08
1 810	4.15	1 880	4.11	1 952	4.08
2 409	4.14	2 502	4.10	2 599	4.08
1 955	4.14	2 031	4.11	2 109	4.08
1 089	4.15	1 131	4.12	1 175	4.09
2 592	4.14	2 692	4.11	2 797	4.08
5 243	4.14	5 446	4.10	5 656	4.08
2 872	4.14	2 984	4.11	3 098	4.08
5 996	4.14	6 229	4.11	6 468	4.08
1 012	4.14	1 052	4.11	1 092	4.08
13 556	4.14	14 080	4.11	14 622	4.08
10 922	4.14	11 346	4.11	11 782	4.08
25 770	4.14	26 767	4.11	27 797	4.08
83 788	4.14	87 032	4.11	90 382	4.08

Tabel 4.5
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten
Malinau, 2017 – 2019

Kecamatan	2017			2018			2019		
	Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan			Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan			Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan		
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
Sungai Boh	1 559	1 317	2 876	1 618	1 369	2 987	1 681	1 421	3 102
Kayan Selatan	1 164	1 128	2 292	1 208	1 172	2 380	1 255	1 217	2 472
Kayan Hulu	1 863	1 531	3 394	1 934	1 591	3 525	2 009	1 652	3 661
Kayan Hilir	1 000	810	1 810	1 038	842	1 880	1 078	874	1 952
Pujungan	1 365	1 044	2 409	1 417	1 085	2 502	1 472	1 127	2 599
Bahau Hulu	1 072	883	1 955	1 113	918	2 031	1 156	953	2 109
Sungai Tubu	586	503	1 089	608	523	1 131	633	542	1 175
Malinau Selatan Hulu	1 369	1 223	2 592	1 421	1 271	2 692	1 477	1 320	2 797
Malinau Selatan	3 137	2 106	5 243	3 257	2 189	5 446	3 384	2 272	5 656
Malinau Selatan Hilir	1 501	1 371	2 872	1 559	1 425	2 984	1 619	1 479	3 098
Mentarang	3 093	2 903	5 996	3 211	3 018	6 229	3 336	3 132	6 468
Mentarang Hulu	536	476	1 012	557	495	1 052	579	513	1 092
Malinau Utara	7 233	6 323	13 556	7 509	6 571	14 080	7 801	6 821	14 622
Malinau Barat	5 781	5 141	10 922	6 002	5 344	11 346	6 235	5 547	11 782
Malinau Kota	13 919	11 851	25 770	14 450	12 317	26 767	15 012	12 785	27 797
MALINAU	45 178	38 610	83 788	46 902	40 130	87 032	48 727	41 655	90 382

4.2. Pembangunan Infrastruktur di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

a. Prasarana Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan merupakan sarana perhubungan di bidang transportasi darat yang merupakan salah satu pendukung yang sangat penting untuk memperlancar akses kegiatan masyarakat dalam perekonomian. Prasarana jalan dan jembatan pada hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik secara aspek social, ekonomi, budaya, maupun ketahanan dan keamanan. Sarana jalan dan jembatan juga sangat penting dalam rangka menunjang pengembangan/peningkatan pembangunan, dan serta menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah/daerah yang berbeda, seperti halnya di dalam penyebaran sumber daya yang tidak merata, intensitas kegiatan ekonomi dimasyarakat berbeda.

Memperhatikan luas wilayah Kabupaten Malinau dan jumlah penduduk yang tersebar secara tidak merata, maka sangat dibutuhkan adanya sarana jalan serta jembatan yang berperan sebagai pendorong pengembangan dan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka perlu pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan yang berkesinambungan pada seluruh ruas jalan yang ada, baik itu jalan Negara, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kecamatan, maupun jalan Desa. *a. Prasarana Pembangunan Gedung Olahraga, Puskesmas, Posyandu, Kantor Desa, Perpustakaan dan Mushola* Gedung merupakan sarana yang paling penting, untuk mempermudah proses pengurusan berbagai kepentingan.

Seperti tempat pertemuan/rapat serta ruang ibadah bagi masyarakat dan aparat desa dalam membahas berbagai permasalahan atau peningkatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Sarana gedung juga merupakan salah satu wadah bagi masyarakat maupun aparat desa untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan desa tersebut. Gedung adalah salah satu kebutuhan umum dalam masyarakat contoh nya gedung olahraga untuk menunjang masyarakat dibidang atlet dimana masyarakat desa mampu menunjukkan kemampuannya dalam bidang olahraga, kemudian gedung puskesmas yang dimana masyarakat memerlukan tempat pelayanan bidang kesehatan sehingga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Masyarakat memerlukan pemimpin untuk melayani dan membantu masyarakat dalam membangun desanya baik sehingga masyarakat memerlukan kantor desa sebagai tempat masyarakat dapat memberikan saran untuk bisa membawa masyarakat kearah yang lebih baik. Perpustakaan dan mushola juga sangat diperlukan masyarakat desa salah satunya rumah ibadah yang wajib ada disetiap desa maupun kota sehingga pembangunan gedung harus ada serta perpustakaan untuk bisa membantu masyarakat dalam mendalami ilmu dengan membaca. *c. Prasarana Kesehatan* Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan disuatu wilayah kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan kepada warga masyarakat yang ada di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Hal ini yang telah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Malinau, terhadap masyarakat Kecamatan Kayan Hulu yang memiliki ekonomi rendah terutama Desa-Desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu.

4. 3 Kendala Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan desa di Kecamatan Kayan Hulu selama ini melalui kebijakan pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah mengalami berbagai kendala yang dapat memperlambat proses pelaksanaan pembangunan. Secara umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru adalah letak geografis yang sulit dijangkau sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai, sumber daya manusia rendah, dan pelepasan lahan dari masyarakat yang begitu sulit, serta keterlambatan keuangan dari pemerintah daerah. Kendala sering muncul terkadang dari adanya kurang kesadaran akan apa yang dikerjakan, tidak ada tindakan langsung dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga akan muncul segala kendala-kendala yang ada dan pelaksanaan pembangunan akan terhambat.

Harusnya segala kendala yang akan terjadi dalam suatu pelaksanaan pembangunan harus bisa diatasi oleh pemerintah setempat sehingga tidak terjadinya pembangunan yang tidak terlaksana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian dari perumusan masalah, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada antarnya di Desa Long Nawang sudah terealisasi dengan baik yang dimana seluruh infrastruktur yang ada yang telah dianggarkan untuk pembangunan kedepan sudah banyak yang terealisasi dari dana yang ada yang diberikan kepada Desa Long Nawang. Sedangkan di Desa Nawang Baru secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik karena di Desa Nawang Baru dana yang ada belum ada sedangkan di Desa Long Nawang sudah ada yang diberikan dari pemerintah, sehingga pembangunan infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi infratraktur maupun dana untuk pembangunan yang ada di desa tersebut. Pada bidang infrastruktur kesehatan, gedung olahraga, kantor desa, perpustakaan serta mushola rumah ibadah sudah terlaksana atau terealisasi dengan baik di Desa Long Nawang dimana pembangunan yang terlihat nyata di desa tersebut lebih berkembang.

Sedangkan pembangunan infrastruktur di Desa Nawang Baru tidak ada hasil pelaksanaan pembangunan yang konkrit belum terealisasi dengan baik, disisi lain beberapa bidang yang dilaksanakan program pembangunan infrastruktur tidak mencapai keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan karena dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur hanya di fokuskan di Desa Long Nawang yang menjadi ibu kota Kecamatan Kayan Hulu sehingga desa yang lainnya kurang perhatian khusus.

2. Perbandingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu adalah pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang lebih baik dan pelaksanaan nya terealisasi dengan baik dimana pembangunan infrastruktur dibidang kesehatan maupun pembangunan gedung lainnya sehingga masyarakat setempat sudah bisa merasakan pembangunan yang ada sedangkan pembangunan infrastruktur di Desa Nawang Baru sampai saat ini belum merasakan kesejahteraan karena pembangunan yang ada didesa tersebut belum terealisasi dengan baik tidak ada pembangunan yang nyata terlihat. Jauh sekali perbandingan kedua desa tersebut dari pembangunan yang ada yang mana tidak ada pembangunan nya yang merata tidak bersinergi karena pembangunan yang baik dan dikatakan berhasil jika pembangunan itu sendiri bisa bersinergi.

kendala dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Long Nawang dan Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Ada beberapa kendala yang dialami desa tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah dalam pencairan dana yang ada khususnya di Desa Nawang Baru yang sampai sekarang mengalami kendala dari dana yang belum diberikan dari pemerintah setempat, yang dari tahun ke tahun diajukan untuk permohonan pembangunan yang tertinggal di Desa Nawang Baru. Dalam hal tersebut kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Nawang Baru sampai sekarang belum terealisasi dibandingkan dengan Desa Long Nawang sudah terealisasi. Kendala tersebut memang sangat berpengaruh dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Long Nawang dan Nawang Baru, yaitu : a. Pelepasan lahan dari masyarakat Desa Nawang Baru, dikarenakan kurangnya respon dari masyarakat dalam membantu aparat desa untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa tersebut. b. Keterlambatan keuangan dari pemerintah pusat untuk proses percepatan pembangunan yang ada di Desa Nawang Baru Kecamatan Kayanh Hulu Kabupaten Malinau.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya di Desa Long Nawang dan Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

Penulis merekomendasikan 4 hal yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Long Nawang dan Nawang Baru dalam peningkatan pembangunan khususnya Desa Nawang Baru.
2. Faktor akses jalan harus diperhatikan pemerintah supaya pembangunan yang ada didesa tersebut bisa berjalan dengan baik.
3. Pemerintah harusnya juga memberikan anggaran pembangunan kepada Desa Nawang Baru yang sama dengan dikeluarkannya anggaran Desa Long Nawang, sehingga tidak terjadi pembangunan yang tidak merata seperti yang terjadi sekarang ini.
4. Perlu menciptakan sumber pendapatan keuangan desa agar tidak bergantung pada anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dari Kabupaten, dengan mendirikan badan usaha milik desa yang bergerak sesuai dengan potensi yang ada didesa. Sehingga desa memiliki pendapatan

keuangan diluar APBD tersebut dan nantinya bisa mencapai desa yang mandiri dan bisa mengendalikan pembayaran pembangunan desanya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008 *Pengantar Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, Said, Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, Uhaiindo Media dan Offoset.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bintarto, R. 1984. *Geografi Desa*. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, Uhaiindo Media dan Offoset.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pedesaan*. Jakarta : Cetakan ke I PT. Pustaka Lidensindo.
- Kodoatie, Robert J. 2005 *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan dan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : BPFE.

Leoman, Soetisno. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius

Miles, Huberman and Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : Third Edition*. Amerika: SAGE.

Moleong, Lexy. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Press. Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Pudjiwati, Sajogyo. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, Sondang, P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : P.T. Bumi Askara

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.

S, Pamudji. 2003. *Perbandingan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi

Askara Sugiyono. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Ulyani, Grand. 2013. *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang : Clogapps
Diponegoro